

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KOTA BIMA TAHUN 2019**



**DINAS SOSIAL KOTA BIMA
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

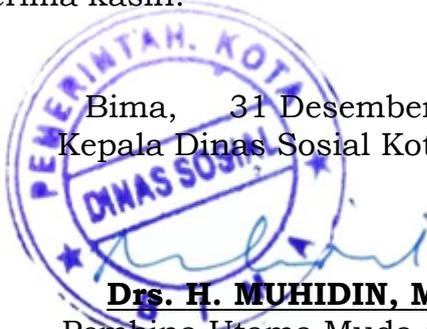
Dengan Rahmat Allah Tuhan yang maha kuasa, Dinas Sosial Kota Bima dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan Dinas Sosial Kota Bima atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), baik yang bersifat administrasi maupun substantif dalam tahun 2019.

Dalam laporan ini diuraikan mengenai deskripsi umum tentang organisasi, permasalahan yang dihadapi sesuai TUPOKSI, Perencanaan Kinerja, dan Laporan Kinerja pada Dinas Sosial Kota Bima selama Tahun 2019. Oleh karena deksripsi dokumen LKIP ini sebagai perwujudan sikronisasi TUPOKSI SKPD, permasalahan SKPD dan Perencanaan Kinerja serta Akuntabilitas Kinerja yang diukur sesuai standar yang ditetapkan pada Dinas Sosial Kota Bima untuk anggaran Tahun 2019.

Demikian penyusunan laporan kami buat dan mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih.

Bima, 31 Desember 2019
Kepala Dinas Sosial Kota Bima,



Drs. H. MUHIDIN, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19631231 199003 1 209

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Data umum organisasi.....	1
B. Aspek strategik organisasi.....	1
C. Struktur organisasi.....	2
D. Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	4
E. Sumber daya organisasi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana strategik organisasi.....	6
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial	12
C. Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Realisasi Keuangan	35
BAB V PENUTUP	36
Lampiran	
1. Pernyataan Perjanjian Kinerja di Kota Bima Tahun 2019	
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019	
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	
4. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019	
5. Pengukuran Kinerja Tahun 2019	
6. Tingkat Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2019	
7. Data Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bima Tahun 2019	
8. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bima Tahun 2019	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Bima. Secara umum bahwa tingkat pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2019, diantaranya; *Pertama*, bahwa Dinas Sosial Kota Bima telah berhasil melaksanakan 19 kegiatan atau 66,88 % dari 20 kegiatan yang ditetapkan sehingga berpengaruh pada peningkatan pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan; *Kedua*, bahwa jumlah anggaran dalam rangka peningkatan pencapaian anggaran pada Tahun 2019 sudah baik, dengan anggaran yang bersumber dari APBD II sebesar **Rp. 5.301.709.125,00,-** (*Lima miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah*), dengan realisasi sebesar **Rp. 4.536.591.844,00,-** (*Empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*). Serta dana dari APBN dan Dekonsentrasi bidang Kesejahteraan Sosial mencapai **Rp. 20.639.125.000,-** (*Dua Puluh miliar enam ratus tiga puluh Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*), - dengan realisasi sebesar **Rp. 20.639.125.000,-** (*Dua Puluh miliar enam ratus tiga puluh Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*),-. *Ketiga* bahwa dukungan sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana) pada Dinas Sosial Kota Bima mampu meningkatkan pencapaian indikator sasaran strategis yang ada. Oleh karenanya dukungan sumber daya untuk peningkatan pencapaian indikator sasaran tersebut sangat mendukung peningkatan pencapaian indikator sasaran strategis tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. DATA UMUM ORGANISASI

Kedudukan Dinas Sosial Kota Bima sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 44 Tahun 2016 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Dinas Sosial Kota Bima adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, tugas pembantuan dan dekonsentrasi.

B. ASPEK STRATEGIK DINAS SOSIAL

1. Lingkungan Intern

- a. Daya dukung fasilitas seperti kantor, gudang tempat penitipan stock barang bantuan bencana/tanggap darurat bencana dan daya pendukung laptop/komputer.
- b. Tugas pokok dan fungsi instansi yang merupakan dasar pokok dalam melaksanakan kegiatan yang diatur oleh Pemerintah Kota Bima.
- c. Jumlah pegawai untuk melaksanakan tugas kedinasan sebanyak 29 orang.
- d. Terdapat 1 (satu) unit mobil tangki, 1 (satu) unit mobil dapur umum, 1 (satu) unit mobil rescue dan 23 (dua puluh tiga) unit kendaraan roda dua dan 1 (satu unit) motor trail.

2. Lingkungan Eksternal

- a. Tersedianya potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, Yayasan, Panti Asuhan, Orsos, LSM, dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersebar di 41 Kelurahan di Kota Bima.
- b. Tersedianya Fasilitator dan Supervisor untuk pendataan BDT dan pelayanan pengaduan kesejahteraan sosial bersama Puskesmas Kelurahan yang tersebar di seluruh Kelurahan
- c. Tersedianya potensi usaha ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga perlu ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilan, kualitas dan modal usaha serta pangsa pasar sehingga pengembangan usaha ekonomi kerakyatan masyarakat dapat ditingkatkan.
- d. Kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan masih kurang, sehingga masih perlu dimotivasi dan dibimbing agar masyarakat merasa terpanggil untuk melaksanakan pembangunan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Sosial Kota Bima Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 44 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial, membawahi;
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin
 - b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
 - c. Seksi Penyuluhan Sosial dan Kepahlawanan

2. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi;
 - a. Seksi Pembinaan Anak dan lanjut Usia
 - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat
 - c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi;
 - a. Seksi Perlindungan Sosial
 - b. Seksi Jaminan Sosial
 - c. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Sosial Kota Bima mempunyai fungsi:

- a. Pengkajian, perencanaan, koordinasi, perumusan kebijakan teknis dibidang sosial.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data, menyusun program dan kegiatan sosial.
- c. Menyelenggarakan usaha penanganan fakir miskin dan pemberdayaan kelembagaan sosial.
- d. Menyelenggarakan Penyuluhan sosial dan pembinaan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan.
- e. Menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial pada anak terlantar, lanjut usia dan penyandang cacat.
- f. Menyelenggarakan usaha rehabilitasi sosial terhadap anak nakal, tuna sosial yang meliputi PSK, pengemis, gelandangan dan eks narapidana.
- g. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan bantuan sosial terhadap keluarga miskin, korban bencana alam, korban tindak kekerasan.
- h. Menyelenggarakan bimbingan organisasi dan bantuan sosial.
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

D. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum permasalahan pelayanan pada Dinas Sosial Kota Bima dapat diidentifikasi sebagai berikut :

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	Permasalahan Pelayanan SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kemiskinan	8,60 %	Menurunnya persentase atau jumlah kemiskinan	Pelayanan terhadap keluarga miskin	Kondisi data yang kurang valid	Pelayanan terhadap keluarga miskin cenderung bias dan memicu konflik sosial.
Korban Bencana Alam dan bencana Sosial	357 Orang	Tertangani jumlah korban bencana alam dan bencana sosial	Pelayanan tanggap darurat terhadap korban bencana alam dan bencana sosial	Penanganan korban bencana menjadi kewenangan lintas sektor	Pelaksanaan pelayanan tanggap darurat bagi korban bencana alam dan bencana sosial

E. SUMBER DAYA ORGANISASI

Dinas Sosial Kota Bima memiliki 29 Orang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan kualifikasi sebagai berikut:

N O	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jenis Kelamin		Golongan		
		SLT A	D3	S1	S2	Pria	Wanita	II	III	IV
1	Dinas Sosial Kota Bima	2	1	22	3	15	13	2	22	4

Selain itu terdapat 11 orang tenaga honorer/kontrak dan 10 orang pegawai sukarela yang mendukung kegiatan-kegiatan

kedinasan. Selain itu untuk mendukung kegiatan di Tingkat Kecamatan terdapat 5 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), dan untuk menyukseskan program di tingkat Kelurahan Dinas Sosial Kota Bima memiliki mitra kerja yakni Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kota Bima.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIK DINAS SOSIAL

Untuk mencapai optimalisasi kinerja pada Dinas Sosial Kota Bima selama 5 (Lima) Tahun kerja dengan melihat potensi dan daya dukung baik internal maupun eksternal. Untuk itu dalam menyusun rencana harus didasarkan pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dengan penyusunan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi SKPD

a. Visi

Visi Organisasi Dinas Sosial Kota Bima adalah:
“Membangun Kemandirian menuju Masyarakat Sejahtera“.

Pengertian dan makna yang terkandung dalam visi tersebut kata kuncinya adalah :

- a. Membangun adalah upaya meningkatkan potensi sosial masyarakat melalui program dan kegiatan yang terencana, sistematis dan berkelanjutan.
- b. Kemandirian adalah kemampuan masyarakat membangun dirinya dalam upaya menata kehidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Masyarakat adalah seluruh masyarakat Kota Bima yang termasuk dalam kategori miskin, cacat, terlantar, tuna

sosial, ketertinggalan atau terpencil, korban bencana alam, bencana sosial.

d. Sejahtera adalah adanya kondisi sosial ekonomi yang baik berupa memiliki pendapatan per kapita yang baik, angka kemiskinan yang terus berkurang, pemenuhan kebutuhan dasar yang membaik serta daya beli masyarakat yang terus meningkat.

b. Misi

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut Dinas Sosial Kota Bima menetapkan misi yang akan menjadi pegangan dalam mengembangkan atau merumuskan langkah selanjutnya. Misi Dinas Sosial Kota Bima adalah:

Meningkatkan pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan secara umum pelaksanaan program atau kegiatan pada Dinas Sosial Kota Bima yaitu :

Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

b. Sasaran

Adapun sasaran Dinas Sosial Kota Bima :

a. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Bima memiliki tugas memberikan pelayanan dan perlindungan pada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Anak Nakal, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK),

Anak dengan Kedisabilitas (ADK), Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan / diperlakukan salah, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Tindak Kekerasan, Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas (Cacat), Tuna Susila, Pengemis, Gelandangan, Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK), Korban Penyalagunaan Napza, Keluarga Fakir Miskin, Keluarga yang Tinggal di Rumah Tak Layak Huni, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, Korban Bencana Alam, Korban Bencana Sosial atau Pengungsi, Pekerja Migran Bermasalah Sosial, Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA), Keluarga Rentan, Eks. Pengidap Penyakit Kusta, dan Penduduk di Daerah Rawan Bencana.

Adapun hubungan antara Tujuan dengan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase penurunan angka PMKS	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	60 %	65 %	70 %	75 %	80 %

3. Strategi dan Kebijakan SKPD

a. Strategi

1. Membangun sistem informasi yang baik dan transparan
2. Memberikan bantuan sosial bagi PMKS.
3. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

b. Kebijakan

Kebijakan pada pembangunan bidang kesejahteraan sosial mencakup:

1. Melaksanakan pendataan dan penanganan permasalahan sosial secara dini dengan mengoptimalkan personil secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Menyusun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian visi dan misi.
3. Memperkuat sistem data dan informasi Kesejahteraan Sosial Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai potensi masyarakat
4. Mendayagunakan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yayasan/Orsos dan organisasi pemuda karang taruna sebagai ujung tombak dan partner kerja untuk mendeteksi serta mendata permasalahan sosial secara dini.

Tabel 3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Membangun Kemandirian menuju Masyarakat Sejahtera.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI I : Meningkatkan pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).			
I. Untuk meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	1 . Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurun.	1 . Membangun sistem informasi yang baik dan transparan	1. Melaksanakan pendataan dan penanganan permasalahan sosial secara dini dengan mengoptimalkan personil secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan.
		2 . Memberikan bantuan sosial bagi PMKS.	2. Menyusun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian visi dan misi.
			3 . Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
		4. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai potensi masyarakat	
			5. Mendayagunakan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yayasan/Orsos dan organisasi pemuda karang taruna sebagai ujung tombak dan partner kerja untuk mendeteksi/mengetahui serta mendata permasalahan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi secara dini.

Adapun sinkronisasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada Dinas Sosial Kota Bima dapat dilihat pada tabel berikut :

VISI : Membangun Kemandirian menuju Masyarakat Sejahtera.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)
MISI I : Meningkatkan pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).			
I. Untuk meningkatkan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	1. Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	1. Membangun sistem informasi yang baik dan transparan	1. Melaksanakan pendataan dan penanganan permasalahan sosial secara dini dengan mengoptimalkan personal secara penuh dalam pelaksanaan kegiatan.
			2. Menyusun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian visi dan misi.
			3. Memperkuat sistem data dan informasi Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja.
		2. Memberikan bantuan sosial bagi PMKS.	4. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif sesuai potensi masyarakat
		3. Meningkatkan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).	5. Mendayagunakan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yayasan/Orsos dan organisasi pemuda karang taruna sebagai ujung tombak dan partner kerja untuk mendeteksi/mengetahui serta mendata permasalahan sosial secara dini.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL

Bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kota Bima telah menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperkuat dengan pernyataan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 (terlampir) sebagai berikut :

No.	Kepala Dinas	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Formula Indikator	Target
1.	Esselon II	1. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	1. Persentase PMKS yang tertangani	Jumlah PMKS yg tertangani dibagi jumlah PMKS seluruhnya	60 %

C. PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kota Bima maka semua ASN yang menduduki eselon di lingkup Dinas Sosial Kota Bima harus memiliki Perjanjian Kinerja atas Indikator Kinerja masing-masing program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan target kinerja (lampiran). Perjanjian Kinerja Dinas Sosial eselon II adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	1. Persentase PMKS yang tertangani	60 %

	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. 823.485.250	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2. 85.250.000	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3. 30.000.000	
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	4. 99.789.500	
5.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	5. 1.131.925.000	
6.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	6. 610.472.000	
7.	Program Pembinaan Anak Terlantar, Anak Beradapan dengan Hukum (ABH) dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	7. 36.990.000	
8.	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	8. 83.990.000	
9.	Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	9. 22.996.500	
10.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	10. 122.458.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan wujud Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam suatu media pelaporan (LKIP) pengusunan LKIP Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2019 ini memuat hasil pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran keberhasilan dengan tolak ukur RENSTRA mengandung arti bahwa setiap akhir tahun anggaran dilakukan proses pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja dengan realisasinya yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial yang mengaju pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Bima.

Penetapan target kinerja atas kegiatan- kegiatan yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan pada saat pengajuan anggaran untuk kegiatan yang bersangkutan dalam formulir Rencana Kerja Anggaran (RKA-DPA) berupa : input, output, dan outcome. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Bima tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran dengan realisasinya dan juga mengukur seberapa efektifnya kegiatan – kegiatan tersebut sebagai berikut :

Pencapaian Tujuan Organisasi:

Meningkatnya kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Adapun indikator dari tujuan organisasi yaitu menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target 80 %. Berikut tabel capaian tujuan organisasi Dinas Sosial Kota Bima :

Table Capaian Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1. Persentase penurunan angka PMK	80 %

Pencapaian Sasaran Strategis :

Meningkatnya perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS

Adapun pengukuran kinerja dalam pencapaian Sasaran strategis Dinas Sosial Kota Bima, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini

Secara umum Dinas Sosial Kota Bima selama Tahun 2019 telah berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah dukungan APBN, APBD II, APBD, dan Dekonsentrasi pada kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Bima pada Tahun 2019. Beberapa pengukuran pencapaian indikator tersebut, diantaranya;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019		
			Target	Realisasi	Tingkat capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	1. Persentase PMKS yang tertangani Formulasi: Jumlah PMKS yg ditangani -----x 100% Jumlah PMKS seluruhnya	60%	66,88 %	111,46 %

Adapun deskripsi secara khusus mengenai tingkat pencapaian beberapa indikator tersebut, antara lain;

1. PMKS yang ditangani

Bahwa pada tahun 2019 terdapat 9.836 (66,88 %) orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani dari jumlah 14.705 orang PMKS yang ada di Kota Bima. Dimana capaian tersebut melebihi target sebesar 60 % pada tahun 2019. Keberhasilan pencapaian target tersebut sangat didukung oleh ada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bima yang bersumber dari APBD II, diantaranya 24 kegiatan bidang teknis dan 26 kegiatan rutin sebagai penunjangnya. Berikut Rekapitulasi data PMKS yang tertangani beserta dokumentasi kegiatannya adalah :

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	JML PMKS	JML TERTANGANI 2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Anak Balita Terlantar	0	0
2	Anak Terlantar	305	115
3	Anak Nakal	0	0
4	Anak Jalanan	0	0
5	Wanita rawan Sosial Ekonomi	0	0
6	Korban Tindak Kekerasan	80	30
7	Lanjut Usia Terlantar	2804	271
8	Penyandang Cacat	907	99
9	Tuna Susila	0	0
10	Pengemis	0	0
11	Gelandangan	0	0
12	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	350	0
13	Korban Penyalahgunaan Napza	224	0
14	Keluarga Fakir Miskin	9618	8.922
15	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	0
16	Komunitas Adat Terpencil	0	0
17	Korban Bancana Alam	221	221
18	Korban Bencana Sosial	136	136
19	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	60	42
20	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0
21	Keluarga Rentan	0	0
	Total	14.705	9.836

Selain dukungan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD II juga terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari APBN dan Dekonsentrasi, diantaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Program Jaminan Sosial terhadap Penyandang Cacat dan Lanjut Usia. Oleh karena kedepan diharapkan dukungan dana pendampingan dari APBD

II terhadap program-program tersebut sangat membantu pencapaian target pelayanan. Beberapa program yang bersumber dari APBN dan Dekonsentrasi, antara lain :

No	Program / Kegiatan	Sasaran		Jumlah Bantuan	Sumber Dana
1	2	3		4	5
1.	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	20	Kelompok	400.000.000	DEKON
2.	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	20	Kelompok	400.000.000	APBN
3.	Asistensi Sosial Kesejahteraan Sosial bagi orang dengan kecacatan berat (odk berat)	88	Orang	316.800.000	APBN
4.	Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	114	Orang	273.600.000	APBD I
5.	Family Support Lanjut Usia	57	Orang	171.000.000	APBN
6.	Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (asistensi) Sosial Dalam Panti	8	LKSA	184.000.000	APBD I
7.	Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (asistensi) Sosial Luar Panti	5	LKSA	115.000.000	APBD I
8.	Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (asistensi) Sosial – TAS dan AMPK	4	LKSA	35.000.000	APBN
9.	Program Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lanjut Usia (asistensi) Sosial dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	-	-	-	-
10.	Kebutuhan Dasar Melalui Home Care	3	LKSLU	102.000.000	APBN
11.	Program Pengembangan Usaha Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	99	Orang	495.000.000	APBN
12.	Kegiatan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat	2	Kelurahan	300.000.000	APBN
13.	Program Keluarga Harapan (PKH)	6.062	KPM	17.846.725.000	APBN
T O T A L				20.639.125.000	

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir

Secara umum bahwa perbandingan pencapaian realisasi Tahun 2018 dengan Tahun sebelumnya menunjukkan adanya peningkatan pencapaian target indikator sasaran pada Dinas Sosial Kota Bima. Meningkatnya pencapaian indikator sasaran pada Dinas Sosial Kota Bima dibanding Tahun sebelumnya dipengaruhi oleh meningkatnya dukungan anggaran dan kemampuan SDM yang ada pada Dinas Sosial Kota Bima dalam melaksanakan koordinasi.

Adapun rincian perbandingan pencapaian target pada Tahun 2019 dengan Tahun 2018 dan 2017 sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2017			2018			2019		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
-1	-2	-3	-4			-5			-6		
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	1. Persentase PMKS yang tertangani	24,50 %	54,30 %	221%	28,81 %	54,81 %	190%	60 %	66,88 %	111,46 %

Adapun deskripsi secara khusus mengenai perbandingan tingkat pencapaian realisasi indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2017 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani sebanyak 7.986 PMKS dari 14.705 jumlah PMKS dengan persentase 54,30 % dari target 24,50 %. Sehingga tingkatan capaian sebesar 221 %. Dan untuk tahun 2018 terdapat 8.061 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial

dari jumlah 14.705 orang PMKS yang ada di Kota Bima atau 54,81 % dari target 28,18 % sehingga tingkatan capaian mencapai 190 %. Kondisi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial tahun 2018 meningkat jika dibandingkan tahun 2017. Keberhasilan pencapaian target tersebut sangat didukung oleh ada Program Keluarga Harapan (PKH), Program Pemberdayaan Sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBe), Program Jaminan Sosial terhadap Penyandang Cacat dan Lanjut Usia. Oleh karena kedepan diharapkan dukungan dana pendampingan dari APBD II terhadap program-program tersebut sangat membantu pencapaian target pelayanan.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Bahwa perbandingan pencapaian realisasi Tahun 2019 dengan target RPJMD menunjukkan peningkatan indikator sasaran strategis pada Dinas Sosial Kota Bima. Bahwa meningkatnya pencapaian target pada Tahun 2019 dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah anggaran, baik yang bersumber dari APBD II, APBN, dan dekonsentrasi. Adapun rincian perbandingan pencapaian target pada Tahun 2019 dengan target pada RPJMD sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target RPJMD	Realisasi Kinerja tahun 2019	Perbandingan Capaian Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target RPJMD (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	60 %	66,88 %	111,46%

4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Bahwa realisasi kinerja Tahun 2019 belum memenuhi target nasional yang ada. Untuk Tahun mendatang target kinerja tersebut diharapkan mampu mencapai target nasional dan lebih tinggi lagi. Adapun rincian perbandingan pencapaian target pada Tahun 2019 dengan target Nasional sebagai berikut :

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Nasional	Realisasi Kinerja tahun 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	1. Persentase PMKS yang tertangani	80,00%	66,88%

5. Capaian Kinerja Eselon III dan Eselon IV di Lingkup Dinas Sosial Kota Bima

Adapun capaian kinerja eselon III dan eselon IV di lingkup Dinas Sosial Kota Bima dapat diukur dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan, dan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

5.1. Capaian Kinerja Eselon II

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	60%	66,88 %	89,71%

5.2 Capaian Kinerja Eselon III

a. Sekretaris

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kelancaran Administrasi pelayanan tugas dan fungsi OPD	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
2	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Cakupan ketersediaan dan Kelayakan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
3	Meningkatnya disiplin aparatur	Persentase pegawai yg disiplin	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kualitas penyajian laporan kinerja dan keuangan	Nilai LKIP Perangkat Daerah	BB	B	B

b. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin	Persentase Fakir Miskin yang tertangani	80%	98,98%	123%
2	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Persentase LKS yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai standar	80%	50%	62,50%

c. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	80%	70%	87,50%

d. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	80%	70%	87,50%
2	Menurunnya jumlah anak terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	Persentase penurunan jumlah anak terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) yang meningkat kemampuannya	80%	80%	100%
3	Terwujudnya kemandirian para	Persentase Penyandang Cacat dan	80%	80 %	100%

	penyanggah cacat	trauma yang tertangani			
4	Terjaring Eks Penyandang Penyakit Sosial	Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani	50%	50%	100%

5.3 Capaian Kinerja Eselon IV

a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Tersedia dan terdistribusinya surat menyurat	Cakupan surat yang terkirim selama 1 tahun	12 Bln	12 Bln	100
2	Tersediannya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	cakupan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12 Bln	12 Bln	70
3	Terlaksananya pemeliharaan dan operasional kendaraan	Cakupan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas	12 Bln	12 Bln	88
4	Tersediannya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Cakupan ruang kantor yang bersih	12 Ruangan	12 Ruangan	100
5	Tersediannya Penyediaan alat tulis kantor	Cakupan Penyediaan alat tulis kantor	12 Bln	12 Bln	100
6	Tersediannya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cakupan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bln	12 Bln	100
7	Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Cakupan komponen instalasi listrik	12 Bln	12 Bln	100
8	Tersediannya peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Bln	12 Bln	100
9	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Cakupan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bln	12 Bln	100
10	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Cakupan kerjasama dengan media	12 media	12 media	100

11	Tersediannya Penyediaan makanan dan minuman	Cakupan Penyediaan makanan dan minuman	12 Bln	12 Bln	100
12	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Cakupan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bln	12 Bln	100
13	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Cakupan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bln	12 Bln	100
14	Tersedianya Kendaraan Operasional Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Baru	3 unit	-	0
15	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	12 Bln	12 Bln	100
16	Tersedianya Mebeleur	Jumlah Mebeleur	1 unit	1 unit	100
17	Terpeliharanya Gedung Kantor	Cakupan Luas Gedung Kantor yang direhabilitasi/peeliharaan	12 Bln	12 Bln	100
18	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	10 unit	10 unit	100
19	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	40 stel	40 stel	100

b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100
2	Terlaksananya Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen yang harus disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	Terlaksananya Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100
4	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DP A/DPPA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan/RKA/DP A Satuan Kerja	4 Dokumen	4 Dokumen	100
5	Terlaksananya Penyusunan LAKIP, LPJ, LPPD	Jumlah dokumen laporan yang sesuai ketentuan	2 Dokumen	2 Dokumen	100

c. Kasi Jaminan Sosial

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin	Persentase PMKS yang mendapatkan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga	80 %	80 %	100
2	Terlaksananya Pelayanan JKN-PBI	Jumlah Peserta JKN-PBI yang dilayani	15.375 jiwa	15.375 jiwa	100

d. Kasi Perlindungan Sosial

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terlaksananya pemberian bantuan bencana alam selama masa tanggap darurat	Persentase korban bantuan bencana alam selama masa tanggap darurat	100 %	100 %	125
2	Terlaksananya pelayanan pada kelompok masyarakat pasca rawan konflik sosial	Jumlah Kelompok masyarakat yang memperoleh bantuan sosial dalam rangka pencegahan konflik sosial	2 kelompok	2 kelompok	100
3	Peningkatan pemberian perlindungan terhadap Korban Tindak kekerasan Pekerja Migran	Persentase korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran yang tertangani	80 %	100 %	125

e. Kasi Pengumpulan dan pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Tersedianya Data Dana Bantuan Sosial	Dokumen database bantuan sosial	1 dokumen	1 dokumen	100

f. Kasi Penanganan Fakir Miskin

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terlaksananya Bimtek petugas dan Pendamping Kesejahteraan Sosial	Jumlah tenaga pendamping yang mengikuti Bimtek	65 orang	-	13,89
2	Terlatihnya Keluarga Miskin dalam kelompok usaha	Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh pelatihan ekonomi	1200 KK	-	-
3	Terlaksananya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan rujukan terpadu yang difasilitasi oleh Puskesmas	734 KK	600 KK	82,56
4	Terlaksananya pendampingan pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang memperoleh BPNT	9618 KK	8922 KK	92,76

g. Kasi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terlaksananya validasi data PMKS	Data base PMKS yang terupdate	1 dokumen	1 dokumen	100
2	Terlaksananya pelatihan pengurus LKS	Jumlah pengurus LKS yang mengikuti pelatihan	30 LKS	30 LKS	100
3	Terlaksananya Lomba PSKS	Jumlah PSKS berprestasi	12 PSKS	12 PSKS	100

h. Kasi Penyuluhan Sosial dan Kepahlawanan,

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terlaksananya Penyuluhan Sosial	Jumlah Peserta yang mengikuti Penyuluhan Sosial	50 orang	50 orang	100
2	Meningkatnya Peran Pemda Kota Bima dalam usaha Kesejahteraan Sosial	Jumlah elemen kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan dari Pemerintah	40 orang	40 orang	100

i. Kasi Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terlaksananya pemberian layanan kebutuhan dasar bagi Lansia	Jumlah lansia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	15 orang	15 orang	100
2	Terlaksananya ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang terlatih	21 orang	21 orang	100
3	Terlaksananya pelayanan psikososial bagi anak terlantar , anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK)	Persentase anak terlantar , anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) yang dilayani psikososial	80 %	80 %	100

j. Kasi Rehabilitasi Penyandang Cacat

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terlatihnya penyandang disabilitas dan eks trauma yg mendapat bantuan modal usaha	Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang mengikuti pelatihan dan yg mendapat bantuan modal usaha	11 orang	11 orang	100

k. Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%)
1	Terbinanya Eks Penyandang Penyakit Sosial	Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani	80 %	100%	100

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.

Sasaran strategis Dinas Sosial adalah **“Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS’**. Hal ini dimaksud adalah Penyelenggaraan perlindungan dan Jaminan sosial ditujukan kepada perseorangan, kelompok, keluarga komunitas dan masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditujukan kepada :

1. Anak Balita terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak Nakal
4. Anak Jalanan
5. Wanita rawan sosial ekonomi
6. Korban tindak kekerasan
7. Lanjut usia terlantar
8. Penyandang Cacat
9. Tuna Sosila
10. Pengemis
11. Gelandangan
12. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)
13. Korban Penyalahgunaan Napza
14. Keluarga Fakir Miskin
15. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
16. Komunitas Adat Terpencil
17. Korban Bencana Alam
18. Korban Bencana Sosial
19. Pekerja Migran Bermasalah Sosial
20. Orang Dengan HIV/AIDS(ODHA)
21. Keluarga Rentan

Adapun Indikator Sasaran Strategis Dinas Sosial adalah Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah PMKS yang ditangani}}{\text{Jumlah PMKS seluruhnya}} \times 100$$

Pada tahun 2019 data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah sebanyak 14.705 PMKS dimana sebanyak 9.836 PMKS mampu ditangani atau sebesar 66,88 %.

Keberhasilan tercapainya indikator kinerja tersebut sangat didukung oleh kemampuan SDM yang ada pada Dinas Sosial Kota Bima yang berjumlah 29 PNS, 21 Tenaga Honor, 5 TKSK dan 41 orang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Selain itu dukungan jumlah anggaran yang bersumber dari APBN, dan dekonsentrasi Tahun 2019 meningkat dibanding dengan Tahun sebelumnya.

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Bahwa keberhasilan pencapaian tersebut sangat efisien mengingat sumber daya yang tersedia pada Dinas Sosial Kota Bima terbatas. Kemampuan pejabat dan staf Dinas Sosial Kota Bima dalam melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk menangani pembangunan kesejahteraan sosial selama Tahun 2019.

Pada tahun 2019 Dinas Sosial Kota Bima memiliki sumber daya yang terbatas, diantaranya 29 PNS, 3 (tiga) mobil operasional, dan 24 (dua puluh empat) sepeda motor. Selain jumlahnya yang terbatas, saat ini kondisi kendaraan Dinas juga mengalami kerusakan. Namun keterbatasan sumber daya yang

dimiliki tersebut tidak mengurangi semangat pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bima.

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pelaksanaan sumber anggaran dari APBD II pada Dinas Sosial Kota Bima tahun 2019 telah melaksanakan 45 (empat puluh lima) kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5
A.	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	823.485.250	805.354.370	97,80
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	101.680.000	99.440.000	97,80
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	24.360.000	16.979.870	69,70
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	29.500.000	26.024.000	88,22
4.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	89.379.000	85.071.000	95,18
5.	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	14.365.000	14.365.000	100,00
6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	72.219.000	72.219.000	100,00
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.400.250	36.400.000	99,99
8.	Penyediaan Komponen Intansi Litrik atau penerangan Bangunan Kantor	10.632.000	10.632.000	100,00
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.950.000	49.450.000	99,99
10.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000000	8.000000	100,00
11.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	20.000.000	100,00
12.	Penyediaan Makan dan Minuman	27.000.000	27.000.000	100,00
13.	Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	340.000.000	339.773.500	99,99
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	85.250.000	45.237.000	53,06
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	40.000.000	0	0
2.	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	7.250.000	7.250.000	100,00
3.	Pengadaan Mebeleur	3.000.000	3.000.000	100,00
4.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	25.000.000	24.987.000	99,95
5.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	10.000.000	10.000.000	100,00

C.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30.000.000	29.735.000	99,12
1.	Pengadaan Pakaian Khusus hari hari tertentu	30.000.000	29.735.000	99,12
D.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	199.789.500	199.338.500	99,77
1.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	41.320.000	41.320.000	100,00
2.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	15.690.000	15.690.000	100,00
3.	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	15.440.000	15.440.000	100,00
4.	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	19.900.000	19.800.000	99,50
5.	Penyusunan Rencana Kerja Tahun/RKA/DPA SKPD	84.097.000	83.746.000	99,58
6.	Penyusunan LAKIP, LPJ, dan LPPD	23.342.500	23.342.500	100,00
E.	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1.131.925.000	465.832.500	41,15
1.	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	654.825.000	90.975.500	13,89
2.	Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	100.000.000	0	0
3.	Pendataan penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	95.810.000	95.660.000	99,84
4.	Penyuluhan Sosial	19.885.000	19.885.000	100,00
5.	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	213.112.000	211.019.000	99,02
6.	Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), E-Warong dan KUBE Jasa	48.293.000	48.293.000	100,00
F.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	610.472.000	598.557.130	98,05
1.	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	202.096.000	193.806.000	95,90
2.	Pendampingan program keluarga harapan (PKH)	284.650.000	281.195.130	98,79
3.	Pendampingan kegiatan keserasihan sosial	22.381.000	22.310.000	99,68
4.	Asuransi Kesejahteraan Sosial dengan Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah	31.364.000	31.364.000	100,00
5.	Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran	21.556.000	21.556.000	100,00

6.	Pengumpulan dan Pengelolaan Dana bantuan Sosial	25.915.000	25.915.000	100,00
7.	Pelayanan kebutuhan dasar bagi lansia	22.500.000	22.401.000	99,56
G.	Pembinaan Anak Terlantar, Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	36.990.000	36.990.000	100,00
1.	Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termaksud anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	21.990.000	21.990.000	100,00
2.	Pelayanan Psikologi terhadap Anak Terlantar, Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	15.000.000	15.000.000	100,00
H.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	83.990.000	83.270.000	99,14
1.	Pendayaagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	83.990.000	83.270.000	99,14
I.	Program Pembinaan eks penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	22.996.500	22.996.500	100,00
1.	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	22.996.500	22.996.500	100,00
J.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	122.458.000	122.258.000	99,84
1.	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	20.264.000	20.064.000	100,00
2.	Peningkatan peran pemerintah daerah dalam usaha kesejahteraan sosial	61.961.000	61.961.000	100,00
3.	Lomba Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	40.233.000	40.233.000	100,00
Jumlah		3.147.356.250	2.409.569.000	76,56

Berdasarkan laporan tersebut bahwa Dinas Sosial Kota Bima pada Tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan teknis secara efektif sebanyak 20 kegiatan dan 24 kegiatan rutin di sekretariat sebagai kegiatan penunjang.

Selain itu terdapat beberapa program yang bersumber dari APBN dan Dekonsentrasi yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja. Beberapa program dan kegiatan tersebut, antara lain:

No	Program / Kegiatan	Sasaran		Jumlah Bantuan	Sumber Dana
1	2	3		4	5
1.	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	20	Kelompok	400.000.000	DEKON
2.	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	20	Kelompok	400.000.000	APBN
3.	Asistensi Sosial Kesejahteraan Sosial bagi orang dengan kecacatan berat (odk berat)	88	Orang	316.800.000	APBN
4.	Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	114	Orang	273.600.000	APBD I
5.	Family Support Lanjut Usia	57	Orang	171.000.000	APBN
6.	Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (asistensi) Sosial Dalam Panti	8	LKSA	184.000.000	APBD I
7.	Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (asistensi) Sosial Luar Panti	5	LKSA	115.000.000	APBD I
8.	Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (asistensi) Sosial – TAS dan AMPK	4	LKSA	35.000.000	APBN
9.	Program Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lanjut Usia (asistensi) Sosial dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	-	-	-	-
10.	Kebutuhan Dasar Melalui Home Care	3	LKSLU	102.000.000	APBN
11.	Program Pengembangan Usaha Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	99	Orang	495.000.000	APBN
12.	Kegiatan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat	2	Kelurahan	300.000.000	APBN
13.	Program Keluarga Harapan (PKH)	6.062	KPM	17.846.725.000	APBN
T O T A L				20.639.125.000	

B. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun 2019 Dinas Sosial Kota Bima memperoleh dukungan dana yang bersumber dari Dana APBD II, dekonsentrasi dan pembantuan. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Dana APBD II

Dana yang bersumber dari APBD II dibiayai dengan dana sebesar **Rp. 5.301.709.125,00,-** (*Lima miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah*), dengan realisasi sebesar **Rp. 4.536.591.844,00,-** (*Empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*) atau 85,57 %. Secara lebih rinci, anggaran dan realisasi keuangan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	2.154.352.875,00	2.127.022.844,00	98,73
2.	Belanja Langsung	3.147.356.250,00	2.409.569.000,00	76,56
	Jumlah	5.301.709.125,00	4.536.591.844,00	85,57

4. Dana Dekonsentrasi dan APBN Non Dekonsentrasi

Pada Tahun anggaran 2019 melalui Dinas Sosial Kota Bima memperoleh dukungan dana yang bersumber dari dana APBN dan Dekonsentrasi sebesar **Rp. 20.639.125.000,-** (*Dua Puluh miliar enam ratus tiga puluh Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*) , - dengan realisasi sebesar **Rp. 20.639.125.000,-** (*Dua Puluh miliar enam ratus tiga puluh Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*) , - atau 100 %. Selain itu terdapat pula

bantuan barang tanggap darurat bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Bima. Secara umum bahwa tingkat pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Bima Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial Kota Bima telah berhasil melaksanakan 19 kegiatan atau 66,88 % dari 20 kegiatan yang ditetapkan sehingga berpengaruh pada peningkatan pencapaian pada 1 (satu) indikator sasaran yang ditetapkan.
2. Realisasi keuangan yang bersumber dari APBD II dari anggaran sebesar **Rp. 5.301.709.125,00,-** (*Lima miliar tiga ratus satu juta tujuh ratus Sembilan ribu seratus dua puluh lima rupiah*), dengan realisasi sebesar **Rp. 4.536.591.844,00,-** (*Empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*).
3. Realisasi keuangan yang bersumber dari dana APBN dan Dekonsentrasi bidang Kesejahteraan Sosial mencapai **Rp. 20.639.125.000,-** (*Dua Puluh miliar enam ratus tiga puluh Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*), - dengan realisasi sebesar **Rp. 20.639.125.000,-** (*Dua Puluh miliar enam ratus tiga puluh Sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah*) , -Bahwa dukungan sumber daya (SDM, anggaran dan sarana serta prasarana) pada Dinas Sosial Kota Bima mampu meningkatkan pencapaian indikator sasaran strategis yang ada. Oleh karenanya dukungan sumber daya untuk peningkatan pencapaian indikator sasaran tersebut sangat mendukung peningkatan pencapaian indikator sasaran strategis tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat kami sampaikan, dan atas kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SKPD
Tahun Anggaran

: Dinas Sosial Kota Bima
: 2019

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	1. Persentase PMKS yang tertangani	60.00%

Raba-Bima, 7 Januari 2020

Kepala Dinas Sosial Kota Bima,



Drs. H. MUHIDIN, MM

Nip. 19631231 199003 1 209

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS SOSIAL KOTA BIMA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	1. Persentase PMKS yang tertangani	60.00%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah sosial	1,131,925,000	APBD
2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	610,472,000	APBD
3. Program Pembinaan Anak terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan khusus (AMPK)	36,990,000	APBD
4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	83,990,000	APBD
5. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks.narapidana, PSK, Narkoba, dan penyakit sosial lainnya)	22,996,500	APBD
6. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	122,458,000	APBD

Walikota Bima

H. MUHAMMAD LUTFI, SE

Raba-Bima, 7 Januari 2020
Kepala Dinas Sosial Kota Bima



Drs. H. MUHIDIN, MM
Nip. 19631231 199003 1 209

**DATA PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DANA DEKON DAN APBN
PADA DINAS SOSIAL KOTA BIMA TAHUN 2019**

No	Program / Kegiatan	Sasaran	Jumlah Bantuan	Sumber Dana
1	2	3	4	5
1	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	20 Kelompok	400,000,000	DEKON
2	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	20 Kelompok	400,000,000	APBN
3	Asistensi Sosial Kesejahteraan Sosial bagi orang dengan kecacatan berat (odk berat)	88 Orang	316,800,000	APBN
4	Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)	114 Orang	273,600,000	DEKON
5	Family Support Lanjut Usia	57 Orang	171,000,000	APBN
6	Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (asistensi) Sosial Dalam Panti	8 LKSA	184,000,000	DEKON
7	Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (asistensi) Sosial Luar Panti	5 LKSA	115,000,000	DEKON
8	Program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (asistensi) Sosial - TAS dan AMPK	4 LKSA	35,000,000	APBN
9	Program Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lanjut Usia (asistensi) Sosial dengan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	-	-	-
10	Kebutuhan Dasar Melalui Home Care	3 LKSLU	102,000,000	APBN
11	Program Pengembangan Usaha Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan (BWBP)	99 Orang	495,000,000	APBN
12	Kegiatan Keserasian Sosial Berbasis Masyarakat	2 Kelurahan	300,000,000	APBN
13	Program Keluarga Harapan (PKH)	6,062 KPM	17,846,725,000	APBN
TOTAL			20,639,125,000	

Kota Bima, Desember 2019
Kepala Dinas Sosial Kota Bima,



Drs. H. Muhidin, MM
NIP.19690531 199003 1 004

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS SOSIAL KOTA BIMA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2019		
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	1. Persentase PMKS yang tertangani	60.00%	66.88%	111.46%

Raba-Bima, Desember 2019

Kepala Dinas Sosial Kota Bima



Drs. H. MUHIDIN, MM

Nip. 19631231 199003 1 209

**TINGKAT REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PADA DINAS SOSIAL KOTA BIMA 2019**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	TINGKAT CAPAIAN (%)
A.	Program Pelayanan administrasi perkantoran	823,485,250	805,354,370	97.80
1	Penyediaan jasa surat menyurat	101,680,000	99,440,000	97.80
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24,360,000	16,979,870	69.70
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	29,500,000	26,024,000	88.22
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	89,379,000	85,071,000	95.18
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	14,365,000	14,365,000	100.00
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	72,219,000	72,219,000	100.00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36,400,250	36,400,000	100.00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10,632,000	10,632,000	100.00
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	49,950,000	49,450,000	99.00
10	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	8,000,000	8,000,000	100.00
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20,000,000	20,000,000	100.00
12	Penyediaan makanan dan minuman	27,000,000	27,000,000	100.00
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	340,000,000	339,773,500	99.93
B.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	85,250,000	45,237,000	53.06
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	40,000,000		-
2	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	7,250,000	7,250,000	100.00
3	Pengadaan mebeleur	3,000,000	3,000,000	100.00
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	25,000,000	24,987,000	99.95
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10,000,000	10,000,000	100.00
C.	Program peningkatan Disiplin Aparatur	30,000,000	29,735,000	99.12
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	30,000,000	29,735,000	99.12
D.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	199,789,500	199,338,500	99.77
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	41,320,000	41,320,000	100.00
2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	15,690,000	15,690,000	100.00
3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	15,440,000	15,440,000	
4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	19,900,000	19,800,000	99.50
5	Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA-SKPD	84,097,000	83,746,000	99.58
6	Penyusunan LAKIP, LPJ, dan LPPD	23,342,500	23,342,500	100.00
E.	Program pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	1,131,925,000	465,832,500	41.15
1	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	654,825,000	90,975,500	13.89
2	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	100,000,000	-	-
3	Pendataan penyandang Masalah Kesejahteraan (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	95,810,000	95,660,000	99.84
4	Penyuluhan Sosial	19,885,000	19,885,000	100.00
5	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	213,112,000	211,019,000	99.02
6	Pendampingan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), E-Warong dan Kube Jasa	48,293,000	48,293,000	100.00

F.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	610,472,000	598,557,130	98.05
-----------	----------------------------------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------

1	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	202,096,000	193,806,000	95.90
2	Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)	284,650,000	281,195,130	98.79
3	Pendampingan Kegiatan Keserasian Sosial	22,381,000	22,310,000	99.68
4	Asuransi Kesejahteraan Sosial dengan Pelayanan Jaminan Kesehatan daerah	31,364,000	31,364,000	100.00
5	Perlindungan terhadap Korban Tindak Kekerasan Pekerja Migran	21,566,000	21,566,000	100.00
6	Pengumpulan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial	25,915,000	25,915,000	100.00
7	Pelayanan Kebutuhan Dasar Bagi Lansia	22,500,000	22,401,000	99.56
G.	Program Pembinaan Anak Terlantar, Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	36,990,000	36,990,000	100.00
1.	Pelatihan Keterampilan dan Pratek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal.	21,990,000	21,990,000	100.00
2.	Pelayanan Psikologi terhadap Anak Terlantar, Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)	15,000,000	15,000,000	100.00
H.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	83,990,000	83,270,000	99.14
1.	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	83,990,000	83,270,000	99.14
I	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya	22,996,500	22,996,500	100.00
1.	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	22,996,500	22,996,500	100.00
J.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	122,458,000	122,258,000	99.84
1	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	20,264,000	20,064,000	99.01
2	Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	61,961,000	61,961,000	100.00
3	Lomba Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	40,233,000	40,233,000	100.00
JUMLAH		3,147,356,250	2,409,569,000	76.56

Raba-Bima, Desember 2019

Kepala Dinas Sosial Kota Bima,



Drs. H. MUHIDIN, MM

Nip. 19631231 199003 1 209

**DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
KOTA BIMA 2019**

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL	JML PMKS 2019	JML TERTANGANI 2019
1	2	13	
1	Anak Balita Terlantar		
2	Anak Terlantar	305	115
3	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan		
4	Anak Nakal		-
5	Anak jalanan		-
6	Anak yang memerlukan perlindungan Khusus		
7	Anak yang berhadapan dengan hukum		
8	Anak dengan kedisabilitas (ADK)		
9	Penyandang Disabilitas	907	99
10	Penyandang Disabilitas berat		
11	Lanjut Usia Terlantar	2,804	271
12	Koban Tindak Kekerasan	80	30
13	Tuna Susila	-	-
14	Gelandangan		-
15	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0	
16	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	350	
17	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	60	42
18	Korban Penyalagunaan Napza	224	
19	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	-
20	Kelompok minoritas		
21	Korban trafficking		
22	Perempuan Rawan Sosial ekonomi		
23	Keluarga Fakir Miskin	9,618	8,922
24	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	0	
25	Korban Bencana Alam	221	221
26	Korban Bencana Sosial	136	136
		0	-
		14,705	9,836

Kota Bima, Desember 2019
Kepala Dinas Sosial Kota Bima,



Drs. H. Mulhidin, MM
NIP. 19690531 199003 1 004